



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/10/NK/VIII/2022
910/47-NK/2022**

TANGGAL 24 AGUSTUS 2022

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR 170/10/NK/VIII/2022
910/47-NK/2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Cimahi, 24 Agustus 2022

WALI KOTA CIMAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



LETKOL (PURN) NGATYANA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAH**

selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

KETUA

**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**

**PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA**

**RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	6
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
2.2 Pendapatan Transfer	8
2.3 Penerimaan Pembiayaan	9
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH	45
BAB V PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	49
BAB VI PENUTUP	50
LAMPIRAN TABEL 4.1.	51

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	9
Tabel	3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
Tabel	3.2.	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	24
Tabel	3.3.	Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	41
Tabel	4.2.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022	46
Tabel	4.3.	Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah	47
Tabel	5.1.	Perubahan Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kekuatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Tahapan awal penyusunan dokumen rancangan perubahan APBD setelah penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Perubahan PPAS APBD berisi program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan APBD yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dengan Wali Kota Cimahi.

KUPA – PPASP APBD Kota Cimahi yang telah disepakati dengan DPRD Kota Cimahi akan digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang memuat program dan kegiatan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.

1.2. TUJUAN

Tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan PPAS-P Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 663, Tambahan Lembaran Daerag Nomor 143).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kemampuan Fiskal bersumber dari pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih baik adalah pendapatan yang bersumber dari PAD. Sementara dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil khususnya sumber-sumber dana bagi hasil Provinsi, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang ketetapanannya menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perubahan target Penerimaan Daerah terdiri dari perubahan target Pendapatan Daerah dan perubahan target Penerimaan Pembiayaan dari rencana sebesar **Rp1.493.264.708.490,00** menjadi **Rp1.618.330.209.433,00** atau bertambah sebesar **Rp125.065.500.943,00**.

2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Target perubahan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp20.013.743.6954,00 (dari Rp355.046.836.583,00 sebelum perubahan, menjadi Rp375.060.580.277,00 setelah perubahan) atau naik sebesar 5,64 persen. Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami perubahan target pendapatan, yaitu bertambah sebesar Rp9.277.606.047,00 atau sebesar 5,84 persen dari semula sebesar Rp158.885.001.230,00 menjadi Rp168.162.607.277,00.

2. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.431.726.500,00 atau sebesar -19,03 persen, dari Rp12.780.921.500,00 sebelum perubahan, menjadi Rp10.349.195.000,00 setelah perubahan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp1.631.413.597,00 atau sebesar 17,37 persen dari Rp9.391.200.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp11.022.613.597,00 setelah perubahan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp11.536.450.550,00 atau sebesar 6,63 persen dari Rp173.989.713.853,00 sebelum perubahan, menjadi Rp185.526.164.403,00 setelah perubahan..

2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pada rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp10.316.208.798,00 atau 1,12 persen, dari Rp924.288.055.7375,00 sebelum perubahan menjadi Rp934.604.264.535,00 setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara total mengalami penurunan sebesar Rp6.551.257.707,00 atau -0,83 persen, dari Rp793.527.526.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp786.976.268.293,00 setelah perubahan.

a. Dana Perimbangan

Dana perimbangan berkurang sebesar Rp6.551.257.707,00 atau -0,83 persen dari 787.999.358,00 sebelum perubahan menjadi 781.448.100.293,00 setelah perubahan.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp5.528.168.000,00.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah bertambah sebesar Rp16.867.466.505,00 dari Rp130.760.529.737,00 sebelum perubahan menjadi Rp 147.627.996.242,00 .

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil bertambah sebesar 3.237.693.705,00 atau meningkat 2,48 persen dari Rp130.760.529.737,00 sebelum perubahan menjadi Rp133.998.223.442,00 setelah perubahan.

b. Bantuan Keuangan

Masuknya target Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp13.629.772.800,00 membuat pendapatan transfer antar daerah meningkat.

2.3. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yaitu adanya perubahan dalam perhitungan SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SiLPA yang berasal dari sisa DAK tahun sebelumnya yang mana semula sebelum perubahan SiLPA sebesar **Rp.213.919.816.170,00** menjadi sebesar **Rp.308.665.364.620,64** setelah perubahan atau bertambah sebesar **Rp.94.745.548.450,64** atau sebesar 44,29 persen. Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	355.046.836.583	375.060.580.277	20.013.743.694
Pajak daerah	158.885.001.230	168.162.607.277	9.277.606.047
Retribusi daerah	12.780.921.500	10.349.195.000	-2.431.726.500
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	11.022.613.597	1.631.413.597
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.989.713.853	185.526.164.403	11.536.450.550
Pendapatan Transfer	924.288.055.737	934.604.264.535	10.316.208.798
Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	786.976.268.293	-6.551.257.707
Transfer antardaerah	130.760.529.737	147.627.996.242	16.867.466.505
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.279.334.892.320	1.309.664.844.812	30.329.952.492
			0
Penerimaan Pembiayaan			0
SiLPA	213.929.816.170	308.665.364.621	94.735.548.451
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.929.816.170	308.665.364.621	94.735.548.451
			0
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.493.264.708.490	1.618.330.209.433	125.065.500.943

Sumber : Bappenda, BPKAD Kota Cimahi (Hasil Pembahasan)

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mekanisme RKA-PD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas program dan plafon anggaran.

Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. PPAS Perubahan APBD TA. 2022 merupakan penjabaran dari pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Di dalam Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) fokus pembangunan tetap diberikan pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2022; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Wali Kota yang tertuang pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Selain itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga tetap harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat provinsi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Peninjauan kembali prioritas pembangunan dipandang perlu mengingat penyusunan APBD Tahun 2022 dilakukan pada Tahun 2021, pada saat dimana beberapa kondisi khusus terjadi, antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang masih menunjukkan angka kasus tinggi;
2. Kebijakan pembatasan penganggaran penghasilan ASN pada tahun 2021;
3. Penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dialokasikan ke dalam struktur anggaran; dan
4. Adanya alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 hasil audit BPK yang lebih dari target yang diasumsikan.

Berdasarkan pertimbangan di atas disusun sinergitas program pembangunan daerah Kota Cimahi terhadap Prioritas Nasional dalam Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 di bawah ini :

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			1) Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama		
				Dinas Kesehatan	
			2) Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan		
				Dinas Kesehatan	
			3) Prevalensi stunting pada balita		
				Dinas Kesehatan	
			4) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)		
				Dinas Kesehatan	
			5) Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin		
				Dinas Kesehatan	
			6) Tingkat Pengobatan TB yang berhasil		
				Dinas Kesehatan	
			7) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		
				Dinas Kesehatan	
			8) Persentase Kasus dan KLB yang ditangani		
				Dinas Kesehatan	
			8) Persentase Kasus dan KLB yang Ditangani		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Kasus dan KLB yang Ditangani		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama		
				Dinas Kesehatan	
			Prevalensi stunting pada balita		
				Dinas Kesehatan	
			Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan		
				Dinas Kesehatan	
			Tingkat Pengobatan TB yang berhasil		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Cakupan rumah tangga yang ber PHBS		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ASN Yang Dibina		
				Dinas Tenaga Kerja	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				Dinas Tenaga Kerja	
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara		
				Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Nilai LAKIP		
				Dinas Tenaga Kerja	
			Persentase Kesesuaian Program di RTKD dengan Program di Renstra		
				Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase pencari kerja yang memiliki standar kompetensi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Tenaga Kerja	
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		
				Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Kenaikan UMK		
				Dinas Tenaga Kerja	
			Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan		
				Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase administrasi kelurahan yang terbina		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase sumberdaya olahraga yang terbina		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)		
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
			Persentase IKM yang berdaya saing		
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Dokumen Anggaran Yang Tepat Waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Kelengkapan Dokumen Milik Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LAKIP		
				Kecamatan Cimahi Tengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Lembaga Yang Berdaya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Cimahi Tengah	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum		
				Kecamatan Cimahi Tengah	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Cimahi Tengah	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Mewujudkan Pengelolaan Jaringan Air Minum untuk pelanggan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Nilai beban pencemar		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase peningkatan kapasitas ipal komunal		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Presentase Luas Genangan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Dokumen Pelaporan Yang Tepat Waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Presentase Realisasi Anggaran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase (%) Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Prosentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Kesehatan, P2KBP3A dan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Olahraga		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LAKIP		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase ASN Yang Dibina		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen Keuangan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah Dokumen Kinerja		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ASN yang dibina		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ASN Yang Dibina		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase penelitian yang dihasilkan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani		
				Kecamatan Cimahi Utara	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan		
				Kecamatan Cimahi Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Cimahi Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya kegiatan penunjang operasional dan pelaksanaan kegiatan kantor		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Terlaksananya program/kegiatan penunjang Kantor		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Selain memperhatikan Prioritas Nasional, penyusunan PPAS juga harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dengan prioritas pemerintah provinsi. Adapun prioritas pembangunan daerah yang merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdiri dari 1 + 9, meliputi :

- 1+ Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
- 1. Akses pendidikan untuk semua;

2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa);
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah); dan
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktifitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengalokasian seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumberdaya keuangan.

Kebutuhan masyarakat dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi *supply* sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Sebagaimana yang termuat di dalam Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 bahwa prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 sebagaimana acuan umum dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Adapun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2022 pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid 19.
2. Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19
3. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19
2. Meningkatnya ketahanan bencana
3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
4. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
8. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Selain itu, prioritas pembangunan ini harus diselaraskan dengan Prioritas Wali Kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yaitu : (1) 1.000 Lapangan Kerja; (2) Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan;(3) Gratis Raskin; (4) Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP; (5) Gratis Izin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi; (6) Tambahan Insentif RT/RW; (7) Alokasi Anggaran Rp.100.000.000,- di setiap RW Per-Tahun; (8) Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan; (9) Tambahan Penghasilan Guru; (10) Tambahan Insentif Guru Ngaji; (11) Tambahan Fasilitas dan Insentif Guru PAUD; (12) Bebas SPP; (13) Keringanan DSP SMU/SMK; (14) Kesejahteraan Buruh; (15) Kestabilan Keberlangsungan Industri; (16) Kemudahan Birokrasi; (17) Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri; (18) Pengembangan Pasar Tradisional; (19) Optimalisasi Sarana Olahraga; (20) Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi; dan (21) Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik.

Berdasarkan uraian dari prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, maka disusun sinkronisasi

pertimbangan di atas disusun sinergitas program pembangunan daerah Kota Cimahi terhadap Prioritas Nasional dalam Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 di bawah ini :

Tabel 3.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
54	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum			
				Dinas Pendidikan	63.750.000	109.245.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Angka Putus Sekolah SD			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Persentase penerapan kurikulum sesuai standar			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
			Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP			
				Dinas Pendidikan	51.375.956.500	54.811.800.226
55	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Kesehatan	5.201.439.000	5.941.251.816

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			1) Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama			
				Dinas Kesehatan	28.318.994.400	48.180.727.500
			2) Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			3) Prevalensi stunting pada balita			
				Dinas Kesehatan	28.318.994.400	48.180.727.500
			4) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			5) Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			6) Tingkat Pengobatan TB yang berhasil			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			7) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			8) Persentase Kasus dan KLB yang ditangani			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			8) Persentase Kasus dan KLB yang Ditangani			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			Persentase Kasus dan KLB yang Ditangani			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama			
				Dinas Kesehatan	21.239.245.800	36.135.545.625
			Prevalensi stunting pada balita			
				Dinas Kesehatan	14.159.497.200	24.090.363.750
			Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875
			Tingkat Pengobatan TB yang berhasil			
				Dinas Kesehatan	7.079.748.600	12.045.181.875

				Dinas Kesehatan	34.311.500.400	48.676.473.380
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

				Dinas Kesehatan	2.132.750.000	2.132.750.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

				Dinas Kesehatan	69.629.000	69.629.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Cakupan rumah tangga yang ber PHBS			
				Dinas Kesehatan	159.366.500	159.366.500

				Dinas Kesehatan	5.580.500	5.580.500
56	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Realisasi Anggaran			
				Dinas Tenaga Kerja	6.462.000	7.568.100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase pencari kerja yang memiliki standar kompetensi			
				Dinas Tenaga Kerja	1.184.141.600	2.687.298.100

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan			
				Dinas Tenaga Kerja	1.184.141.600	2.687.298.100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			
				Dinas Tenaga Kerja	181.860.400	181.860.400
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Kenaikan UMK			
				Dinas Tenaga Kerja	479.472.100	486.397.100
			Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan			
				Dinas Tenaga Kerja	479.472.100	486.397.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Pangan dan Pertanian	21.689.800	18.205.800
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	447.283.000	442.398.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	106.000.000	106.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	482.257.600	452.177.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	1.102.914.900	1.266.202.400
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	337.913.100	458.811.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

				Dinas Pangan dan Pertanian	33.310.100	33.310.100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jml. Kelurahan yang dilayani)			
				Dinas Pangan dan Pertanian	104.220.000	124.220.000

				Dinas Pangan dan Pertanian	30.650.500	379.917.500
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900
			Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900
			Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900
			Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900
			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi			
				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	3.592.801.900	3.592.801.900

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	447.000.000	845.273.200
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	357.275.900	362.802.700
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	54.837.600	54.837.600
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	57.231.000	57.231.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

				Sekretariat Daerah	226.363.200	226.363.200
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.331.000	26.921.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Kecamatan Cimahi Utara	129.744.650	129.744.650
57	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata					
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)			
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	259.730.000	2.379.763.050
			Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)			
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	259.730.000	2.379.763.050
59	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Mewujudkan Pengelolaan Jaringan Air Minum untuk pelanggan			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.515.990.640	5.377.462.735
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.980.000	98.980.000
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.980.000	98.980.000
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.980.000	98.980.000
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	64.290.800	64.290.800
			Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.411.243.727	9.411.243.727
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase sarana permukiman yang tersedia (Jalan Setapak)			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.907.598.250	6.402.598.250
60	Gerakan Membangun Desa					
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase administrasi kelurahan yang terbina			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.040.900	45.790.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	712.459.300	855.390.300
61	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

				Dinas Sosial	771.645.600	969.597.880
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

				Dinas Sosial	1.421.962.400	1.421.962.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

				Dinas Sosial	3.708.744.800	4.550.114.440
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Sosial	778.973.000	782.153.960
62	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				RSUD CIBABAT	10.458.950.000	10.458.950.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase Kapasitas Pengendali Banjir Terhadap Kapasitas Pengendali Banjir Yang Ideal			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.925.599.856	6.897.171.444
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Nilai beban pencemar			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.442.692.400	3.428.349.900
			Persentase peningkatan kapasitas ipal komunal			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.442.692.400	3.428.349.900
			Persentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.442.692.400	3.428.349.900
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.885.384.800	6.856.699.800
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Presentase Luas Genangan			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	171.820.063	207.534.467
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Luas kawasan kumuh ringan			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.972.368.250	5.153.198.250
			Persentase rumah tidak layak huni			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.972.368.250	5.153.198.250
			Rasio Rumah Tidak Layak Huni			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.972.368.250	5.153.198.250
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase sarana permukiman yang tersedia (Jalan Setapak)			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.940.593.150	3.238.388.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Sosial	6.110.478.472	6.229.085.592
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

				Dinas Sosial	979.643.000	881.533.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.968.283.642	8.012.251.342
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	763.088.500	837.632.300
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.090.000	131.170.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.405.000	60.405.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.893.700	210.438.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.150.000	167.267.800
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Validitas Database Pelayanan Kependudukan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	234.229.800	228.229.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	491.962.000	489.469.400
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	6.560.401.800	3.417.558.900

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Keluarga Berencana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	319.973.400	3.420.491.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Komunikasi dan Informatika	6.762.463.160	6.820.453.260
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				

				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.107.129.800	2.107.129.700
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				

				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.929.828.800	2.901.330.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				

				Dinas Komunikasi dan Informatika	263.938.600	263.938.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				

				Dinas Komunikasi dan Informatika	368.964.000	368.964.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

				Dinas Arsip Daerah	605.563.200	605.563.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Arsip Daerah	6.179.219.327	6.179.219.327
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				

				Dinas Arsip Daerah	352.663.500	352.663.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				

				Dinas Arsip Daerah	177.400.000	177.400.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	13.560.000	13.560.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik			
				Sekretariat Daerah	501.196.600	576.186.500
			Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik			
				Sekretariat Daerah	501.196.600	576.186.500
			Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran			
				Sekretariat Daerah	501.196.600	576.186.500
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Persentase Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi			
				Sekretariat Daerah	20.494.000	20.494.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

				Sekretariat Daerah	362.731.600	474.156.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Sekretariat DPRD	45.217.282.068	48.650.409.668
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD			
				Sekretariat DPRD	809.858.800	721.162.800

				Sekretariat DPRD	32.871.766.500	36.048.205.900
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Persentase Dokumen Anggaran yang tepat waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.603.900	150.353.900
			Persentase Dokumen Pelaporan yang Tepat Waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.603.900	150.353.900
			Persentase Dokumen Pelaporan Yang Tepat Waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.244.000	58.244.000
			Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.603.900	150.353.900
			Persentase dokumen yang disusun dan ditetapkan tepat waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.727.800	16.727.800
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Persentase Dokumen Anggaran Yang Tepat Waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.601.400	50.101.400
			Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.601.400	50.101.400
			Persentase Kelengkapan Dokumen Milik Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.601.400	50.101.400
			Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.601.400	50.101.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Realisasi Anggaran			
				Kecamatan Cimahi Utara	6.110.000	6.110.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Jumlah Jenis Izin Yang Dapat Dilayani Sesuai Standar Pelayanan			
				Kecamatan Cimahi Utara	20.147.900	20.147.900
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani			
				Kecamatan Cimahi Utara	20.147.900	20.147.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			1			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.928.324.508	4.928.324.508
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Persentase ASN Yang Dibina			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Persentase Realisasi Anggaran			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.238.500	6.438.500
			Terlaksananya kegiatan penunjang operasional dan pelaksanaan kegiatan kantor			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.003.200	65.003.200
			Terlaksananya program/kegiatan penunjang Kantor			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	221.696.750	322.352.750

				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.375.000	77.375.000
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				

				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.953.100	446.953.100
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
			Meningkannya peran parpol dan lembaga melalui pendidikan politik, etika dan budaya politik			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.105.530.450	2.194.386.450
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat				
			Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	494.106.100	484.506.100
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				

				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	261.962.600	261.962.600
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
			terciptanya keamanan dan ketentraman wilayah (masyarakat kondusif)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.664.594.000	1.940.432.000
65	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana					
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			Rasio Rumah Tidak Layak Huni			
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	749.058.640	999.391.140
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai LAKIP			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.425.000	14.425.000
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.300.000	44.300.000
			Presentase Realisasi Anggaran			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.391.828.991	4.372.656.091
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Persentase (%) Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	904.035.200	923.208.100
			Persentase (%) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	810.866.600	810.233.400
			Persentase (%) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	820.277.000	820.910.200

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas dan Sasaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 adalah seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
Kota Cimahi Tahun 2022

NO.	PRIORITAS KOTA CIMAHI	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid- 19.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
3	Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Meningkatnya profesionalitas aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			

NO.	PRIORITAS KOTA CIMAHI	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
4	Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Meningkatnya pemerataan pendapatan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

NO.	PRIORITAS KOTA CIMAHI	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Menurunnya tingkat pengangguran	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
5	Pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19	Menurunnya kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
7	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Meningkatnya pelayanan air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Mengurangi luas kawasan kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
8	Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO.	PRIORITAS KOTA CIMAHI	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING
URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana yang termuat di dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah dalam perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp125.075.500.942,64 atau 8,45 persen dari anggaran semula sebesar Rp1.480.824.900.153,00 menjadi Rp1.605.900.401.095,64. Sehingga secara keseluruhan terjadi kekurangan anggaran belanja sebesar Rp296.235.556.283,64. Kekurangan ini ditutupi dengan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

1. Alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Visi dan Misi RPJMD;
4. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan;
6. Mendukung kegiatan prioritas sektoral;
7. Mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
8. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Belanja Modal minimal;
9. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;
11. Alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peningkatan efisiensi belanja; dan
13. Diarahkan menuju anggaran berimbang.

Berdasarkan Kebijakan Perubahan Anggaran di atas maka disusun Perubahan Plafon Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti dalam Tabel 4.1. (Lampiran). Apabila diuraikan menurut rincian belanja, maka perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM	SESUDAH	Rp	%
1	Belanja Operasi	1.377.256.987.159	1.478.265.736.988	101.008.749.829	7,33
	a. Belanja Pegawai	727.600.156.083	753.943.623.317	26.343.467.234	3,62
	b. Belanja Barang dan Jasa	549.567.914.626	673.397.514.028	123.829.599.402	22,53
	c. Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	0	0,00
	d. Belanja Subsidi	200.000.000	0	-200.000.000	-100,00
	e. Belanja Hibah	96.603.586.450	46.025.930.688	-50.577.655.762	-52,36
	f. Belanja Bantuan Sosial	2.785.330.000	4.398.668.955	1.613.338.955	57,92
2	Belanja Modal	78.567.912.994	103.113.931.108	24.546.018.114	31,24
	a. Belanja Modal Tanah	1.691.568.810	7.121.700.498	5.430.131.688	321,01
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558	25.268.638.193	9.639.009.635	61,67
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946	51.284.189.968	5.518.950.022	12,06
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680	17.798.135.549	2.504.387.869	16,38
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000	1.641.266.900	1.453.538.900	774,28
3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	24.520.733.000	-479.267.000	-1,92
	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	24.520.733.000	-479.267.000	-1,92
	JUMLAH	1.480.824.900.153	1.605.900.401.096	125.075.500.943	8,45

Sumber : SIPD, Diolah

Sedangkan apabila diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah maka perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 adalah seperti pada Tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3.
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BEKURANG	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	398.257.489.147	408.473.721.120	10.216.231.973	2,57%
2	Dinas Kesehatan	129.417.799.151	151.825.851.131	22.408.051.980	17,31%
3	RSUD CIBABAT	204.421.407.702	245.511.027.176	41.089.619.474	20,10%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.069.568.789	51.527.608.120	8.458.039.331	19,64%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.749.620.168	61.288.801.763	4.539.181.595	8,00%
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.029.210.058	26.333.408.625	3.304.198.567	14,35%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.980.755.791	6.980.755.791	-	0,00%
8	Dinas Sosial	13.771.447.272	14.834.447.272	1.063.000.000	7,72%
9	Dinas Tenaga Kerja	9.319.648.353	10.949.849.853	1.630.201.500	17,49%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.280.598.242	17.480.598.242	200.000.000	1,16%
11	Dinas Pangan dan Pertanian	12.048.477.053	12.397.744.053	349.267.000	2,90%
12	Dinas Lingkungan Hidup	54.406.395.950	54.506.395.950	100.000.000	0,18%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.677.295.758	10.930.518.558	253.222.800	2,37%
14	Dinas Perhubungan	32.295.570.276	33.605.808.444	1.310.238.168	4,06%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.475.019.360	12.475.019.360	-	0,00%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.748.518.561	30.097.649.874	349.131.313	1,17%
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	31.928.075.534	44.735.575.084	12.807.499.550	40,11%
18	Dinas Arsip Daerah	7.372.233.027	7.372.233.027	-	0,00%
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	24.100.178.400	24.700.178.400	600.000.000	2,49%
20	Sekretariat Daerah	61.651.071.652	64.203.592.263	2.552.520.611	4,14%
21	Sekretariat DPRD	87.277.207.777	94.127.207.777	6.850.000.000	7,85%
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.664.043.562	14.524.783.562	860.740.000	6,30%
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.639.060.952	13.139.060.952	1.500.000.000	12,89%
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.348.954.330	49.885.523.411	2.536.569.081	5,36%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.131.336.350	12.777.461.350	646.125.000	5,33%
26	Inspektorat	10.154.990.436	11.075.290.436	920.300.000	9,06%
27	Kecamatan Cimahi Utara	30.301.279.545	30.340.379.545	39.100.000	0,13%

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BEKURANG	
		Rp	Rp	Rp	%
28	Kecamatan Cimahi Tengah	41.566.298.605	41.584.539.605	18.241.000	0,04%
29	Kecamatan Cimahi Selatan	37.384.991.144	37.406.063.144	21.072.000	0,06%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.356.357.208	10.809.307.208	452.950.000	4,37%
Grand Total		1.480.824.900.153	1.605.900.401.096	125.075.500.943	8,45%

Sumber : SIPD, Diolah

BAB V
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana perubahan target Pembiayaan Daerah yang disusun di dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 bahwa kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yaitu adanya perubahan dalam perhitungan SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SiLPA yang berasal dari sisa DAK tahun sebelumnya yang mana semula sebelum perubahan SiLPA sebesar **Rp.213.919.816.170,00** menjadi sebesar **Rp.308.665.364.620,64** setelah perubahan atau bertambah sebesar **Rp.94.745.548.450,64** atau sebesar 44,29 persen, maka target pembiayaan daerah pada Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN (Rp)		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170	308.665.364.621	
6.1.01	SiLPA	213.919.816.170	308.665.364.621	Laporan Keuangan 2021 (Hasil Audit BPKD)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170	308.665.364.621	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337	12.429.808.337	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor. SLA-1208/DP3/2007
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	12.429.808.337	12.429.808.337	
	Pembiayaan Neto	201.490.007.833	296.235.556.284	

Sumber : BPKAD (Diolah)

BAB VI P E N U T U P

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi yang menjadi landasan dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga Pemerintah Daerah melakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara Wali Kota Cimahi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terjadi perubahan terhadap asumsi yang digunakan sebagai dasar penetapan yang merupakan akibat dari (1) adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi; dan/ atau (2) adanya penambahan/ pengurangan sumber pendapatan daerah, maka dapat dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Perubahan tersebut akan dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tanpa melakukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, selanjutnya untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	398.257.489.147	408.473.721.120	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	398.257.489.147	408.473.721.120	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	398.257.489.147	408.473.721.120	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.041.534.547	281.263.519.171	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.454.850	262.003.514	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.406.900	146.578.500	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.580.700	6.580.700	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.581.950	6.581.950	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.885.300	102.262.364	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	272.286.379.897	278.849.150.229	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	272.153.240.247	278.716.786.451	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.417.350	15.417.350	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	117.722.300	116.946.428	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.320.100	556.753.100	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348.320.100	556.753.100	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.001.900	932.396.964	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.149.000	142.149.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.985.000	5.985.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.542.900	165.157.964	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.859.000	41.859.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.466.000	553.246.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	160.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	160.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.252.300	147.864.364	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.365.300	86.365.300	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.887.000	61.499.064	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.125.500	355.351.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.770.000	90.090.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.750.000	109.245.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.605.500	156.016.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	123.935.079.900	126.959.149.249	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67.441.555.900	69.996.084.402	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	893.154.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.742.686.500	5.742.686.500	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.008.862.000	7.310.890.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	743.448.000	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	99.634.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	899.058.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	227.678.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	648.394.700	1.098.394.600	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	256.000.000	1.538.849.900	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	98.109.900	98.109.900	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	10.090.000	10.090.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	142.273.000	262.192.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.113.480.700	4.118.794.148	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	659.786.000	606.380.300	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128.603.100	140.582.828	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.633.270.000	46.206.141.726	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.178.540.200	37.287.491.523	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6.376.050.000	707.520.250	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	3.773.010.833	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	595.878.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	300.163.250	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.129.477.667	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	231.417.355	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	190.962.500	193.762.500	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.545.070.000	1.707.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	80.222.100	80.222.100	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.863.100	9.863.100	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	230.899.000	323.433.064	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.269.366.000	1.432.205.728	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92.416.500	432.087.900	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	74.651.000	71.463.064	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.109.040.000	26.299.586.712	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.835.774.500	9.758.751.400	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	208.728.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	450.259.600	141.530.800	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	203.796.000	203.796.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	100.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.305.882.600	4.004.529.500	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	5.100.166.300	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.479.209.300	9.916.821.924	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	125.442.000	125.442.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3.662.250.000	1.000.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	6.145.020.000	5.730.415.424	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	546.497.300	526.064.500	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	2.534.900.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	280.874.700	251.052.700	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	280.874.700	251.052.700	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	280.874.700	251.052.700	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	333.839.206.853	397.336.878.307	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	129.417.799.151	151.825.851.131	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	103.883.983.751	123.470.990.217	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.956.163.851	61.212.764.062	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.386.100	261.386.100	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.140.700	175.140.700	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.245.400	86.245.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.704.088.551	58.960.688.762	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.408.413.551	58.665.013.762	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	295.675.000	295.675.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.040.000	135.040.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135.040.000	135.040.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.533.200	648.533.200	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.002.000	10.002.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.175.600	137.175.600	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.884.000	22.884.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.133.600	150.133.600	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.382.000	153.382.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.956.000	174.956.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.135.000	20.135.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.135.000	20.135.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.771.000	279.771.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	100.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.771.000	179.771.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.210.000	907.210.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.970.000	620.970.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	286.240.000	286.240.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.419.590.700	60.749.996.955	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.079.748.600	12.045.181.875	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.545.526.000	2.545.526.000	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	1.961.332.675	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	637.300.000	637.300.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.896.922.600	3.923.723.200	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	2.977.300.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.715.879.800	48.080.852.780	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.380.000	48.380.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	791.225.000	791.225.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.475.000	100.475.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.550.000	56.550.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	192.028.000	192.028.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	238.401.400	238.401.400	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.113.400	45.113.400	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.146.400	60.146.400	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	57.894.400	57.894.400	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	164.899.900	164.899.900	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.034.709.300	265.409.300	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	398.390.000	190.390.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	796.205.000	796.205.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	726.111.800	726.111.800	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	88.999.000	88.999.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	218.479.800	218.479.800	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	362.749.600	362.749.600	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	111.309.600	111.309.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	232.487.300	232.487.300	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	489.533.000	489.533.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.274.821.000	41.617.093.980	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	141.552.400	141.552.400	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.673.000	154.673.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	713.716.000	713.716.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	217.029.500	217.029.500	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	223.962.300	223.962.300	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19.579.000	19.579.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	129.319.200	129.319.200	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	75.064.100	75.064.100	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	400.000.000	400.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.202.150.000	1.202.150.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.202.150.000	1.202.150.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	825.000.000	825.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	377.150.000	377.150.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	69.629.000	69.629.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.850.000	20.850.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.850.000	20.850.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40.854.000	40.854.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40.854.000	40.854.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.925.000	7.925.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.925.000	7.925.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	236.450.200	236.450.200	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.366.500	159.366.500	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	159.366.500	159.366.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.503.200	71.503.200	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	71.503.200	71.503.200	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	5.580.500	5.580.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.580.500	5.580.500	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Padasuka	2.331.897.696	2.733.434.539	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.826.637.696	2.228.174.539	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.826.637.696	2.228.174.539	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.826.637.696	2.228.174.539	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	397.460.000	397.460.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397.460.000	397.460.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.930.000	33.930.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.200.000	1.200.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	750.000	750.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42.000.000	42.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.700.000	27.700.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.375.000	27.375.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.050.000	1.050.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	77.075.000	77.075.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79.500.000	79.500.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.930.000	14.930.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000	30.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	46.650.000	46.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.800.000	13.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	107.800.000	107.800.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	107.800.000	107.800.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	107.800.000	107.800.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Melong Asih	1.907.490.000	2.035.428.263	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.473.860.000	1.601.798.263	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.473.860.000	1.601.798.263	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.473.860.000	1.601.798.263	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	290.630.000	290.630.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.630.000	290.630.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.535.000	22.535.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.750.000	3.750.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	375.000	375.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.685.000	31.685.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.700.000	19.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.550.000	2.550.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.080.000	21.080.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.250.000	7.250.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.250.000	7.250.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.500.000	8.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.250.000	10.250.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.000.000	11.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	65.780.000	65.780.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.915.000	9.915.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.900.000	2.900.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.810.000	15.810.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.575.000	19.575.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.000.000	23.000.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.725.000	7.725.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Melong Tengah	1.446.824.000	1.482.110.177	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	992.624.000	1.027.910.177	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	992.624.000	1.027.910.177	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	992.624.000	1.027.910.177	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	311.200.000	311.200.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311.200.000	311.200.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.275.000	13.275.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.475.000	17.475.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.475.000	14.475.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.160.000	11.160.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.290.000	1.290.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.480.000	9.480.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.700.000	75.700.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.575.000	25.575.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.810.000	9.810.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.005.000	10.005.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.870.000	9.870.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.360.000	84.360.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.775.000	5.775.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.650.000	1.650.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Cigugur Tengah	2.094.388.800	2.315.207.135	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.478.039.000	1.698.857.335	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.478.039.000	1.698.857.335	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.478.039.000	1.698.857.335	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	510.749.800	510.749.800	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	510.749.800	510.749.800	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.604.800	69.604.800	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.250.000	5.250.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.200.000	4.200.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.990.000	72.990.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.250.000	71.250.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000	6.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	104.775.000	104.775.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.350.000	4.350.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.200.000	13.200.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	118.180.000	118.180.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000	9.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.050.000	13.050.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	105.600.000	105.600.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	105.600.000	105.600.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	105.600.000	105.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Cimahi Selatan	2.247.826.000	2.144.929.112	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.775.796.000	1.672.899.112	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.775.796.000	1.672.899.112	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.775.796.000	1.672.899.112	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	364.230.000	364.230.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	364.230.000	364.230.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.075.000	15.075.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	750.000	750.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.800.000	49.800.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.025.000	29.025.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.620.000	18.620.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.600.000	9.600.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.600.000	9.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.600.000	6.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.300.000	9.300.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.000.000	15.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	58.175.000	58.175.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29.250.000	29.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.150.000	6.150.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	77.975.000	77.975.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.800.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.060.000	18.060.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	107.800.000	107.800.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	107.800.000	107.800.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	107.800.000	107.800.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Cipageran	2.338.225.000	2.718.485.204	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.760.339.000	2.140.599.204	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.760.339.000	2.140.599.204	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.760.339.000	2.140.599.204	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	434.886.000	434.886.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.886.000	434.886.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.925.000	48.925.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.750.000	10.750.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.625.000	60.625.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.575.000	29.575.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.500.000	16.500.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.000.000	3.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.250.000	7.250.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000	6.300.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	96.261.000	96.261.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.865.000	17.865.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.450.000	22.450.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.250.000	13.250.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	64.250.000	64.250.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.250.000	5.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22.135.000	22.135.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000	3.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cimahi Tengah	2.098.255.000	2.447.070.757	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.607.385.000	1.956.200.757	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.607.385.000	1.956.200.757	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.607.385.000	1.956.200.757	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	385.270.000	385.270.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.270.000	385.270.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.275.000	25.275.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	600.000	600.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.750.000	53.750.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.375.500	27.375.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.495.000	18.495.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.450.000	6.450.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.250.000	2.250.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000	1.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	84.854.500	84.854.500	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	930.000	930.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.060.000	3.060.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	80.200.000	80.200.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.030.000	43.030.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	22.950.000	22.950.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	105.600.000	105.600.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	105.600.000	105.600.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	105.600.000	105.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Citeureup	1.887.186.000	1.935.691.816	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.357.186.000	1.405.691.816	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.357.186.000	1.405.691.816	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.357.186.000	1.405.691.816	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	387.000.000	387.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	387.000.000	387.000.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.245.000	19.245.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	61.530.000	61.530.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.410.000	49.410.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.600.000	12.600.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.050.000	4.050.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.050.000	4.050.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.050.000	1.050.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	88.765.000	88.765.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	540.000	540.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.825.000	4.825.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.600.000	10.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	78.485.000	78.485.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.500.000	32.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.550.000	11.550.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Cimahi Utara	2.522.333.304	2.908.742.023	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.893.304	2.501.302.023	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.114.893.304	2.501.302.023	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.114.893.304	2.501.302.023	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	262.240.000	262.240.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.240.000	262.240.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.755.000	7.755.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	750.000	750.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	45.450.000	45.450.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.900.000	21.900.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.800.000	17.800.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.200.000	10.200.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.775.000	5.775.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.675.000	6.675.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	70.920.000	70.920.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.565.000	23.565.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.725.000	1.725.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.650.000	7.650.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.650.000	4.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.275.000	19.275.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	145.200.000	145.200.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	145.200.000	145.200.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	145.200.000	145.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Pasirkaliki	1.224.032.000	1.311.276.605	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	672.082.000	759.326.605	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	672.082.000	759.326.605	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	672.082.000	759.326.605	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	408.950.000	408.950.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.950.000	408.950.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.860.000	48.860.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.150.000	3.150.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.545.000	4.545.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	79.704.000	79.704.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.429.000	13.429.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.450.000	10.450.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.750.000	6.750.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.100.000	2.100.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.265.000	11.265.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	83.975.000	83.975.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.033.000	5.033.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.875.000	4.875.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000	8.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.585.000	45.585.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.779.000	73.779.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000	750.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Cibeureum	2.497.616.000	2.833.964.818	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.386.000	2.252.734.818	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.916.386.000	2.252.734.818	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.916.386.000	2.252.734.818	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	438.230.000	438.230.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	438.230.000	438.230.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.925.000	25.925.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.275.000	1.275.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	45.150.000	45.150.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.425.000	37.425.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.100.000	16.100.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.800.000	7.800.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.800.000	7.800.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.470.000	3.470.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.550.000	2.550.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.025.000	4.025.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	98.825.000	98.825.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	66.170.000	66.170.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.400.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.500.000	10.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	76.525.000	76.525.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.740.000	17.740.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.200.000	11.200.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450.000	450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Cibeber	1.410.208.900	1.641.315.760	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	951.529.000	1.182.635.860	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	951.529.000	1.182.635.860	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	951.529.000	1.182.635.860	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	315.679.900	315.679.900	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	315.679.900	315.679.900	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.075.000	21.075.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.350.000	4.350.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.350.000	1.350.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.750.000	30.750.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.450.000	41.450.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.250.000	12.250.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.850.000	2.850.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	93.109.900	93.109.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.775.000	17.775.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.470.000	25.470.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.175.000	50.175.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.400.000	5.400.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	225.000	225.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Leuwigajah	1.527.532.700	1.847.204.705	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	935.243.000	1.254.915.005	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	935.243.000	1.254.915.005	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	935.243.000	1.254.915.005	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	449.289.700	449.289.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449.289.700	449.289.700	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.536.700	51.536.700	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.050.000	4.050.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.940.000	47.940.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.742.000	23.742.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.500.000	14.500.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.250.000	8.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.940.000	2.940.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.900.000	3.900.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.125.000	7.125.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.770.000	13.770.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.000.000	21.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	51.740.000	51.740.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43.211.000	43.211.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.320.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.800.000	15.800.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	41.375.000	41.375.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.650.000	31.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.390.000	49.390.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	14.850.000	14.850.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000	750.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD CIBABAT	204.421.407.702	245.511.027.176	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD CIBABAT	204.421.407.702	245.511.027.176	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.962.457.702	49.062.457.702	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.962.457.702	49.062.457.702	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.962.457.702	49.062.457.702	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	155.458.950.000	196.448.569.474	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.458.950.000	196.448.569.474	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.458.950.000	10.458.950.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	145.000.000.000	185.989.619.474	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67.320.921.890	78.092.827.816	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.069.568.789	51.527.608.120	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.069.568.789	51.527.608.120	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.179.568.019	9.525.350.019	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.779.800	71.779.800	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.279.800	67.279.800	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.872.855.519	8.172.855.519	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.824.135.819	8.124.135.819	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900	999.900	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	47.719.800	47.719.800	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.500.000	17.500.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.180.700	404.962.700	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.221.900	99.003.900	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.725.500	133.725.500	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.743.300	16.743.300	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.490.000	131.490.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.517.000	213.517.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.440.000	85.440.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000	28.200.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.877.000	99.877.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.735.000	644.735.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.110.000	555.110.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.625.000	89.625.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.916.715.670	8.282.737.832	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.916.715.670	8.282.737.832	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.816.715.670	7.182.737.832	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25.216.765.100	32.008.782.269	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	25.216.765.100	32.008.782.269	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	311.959.800	311.959.800	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	600.000.000	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	212.749.300	212.749.300	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.733.286.500	25.415.401.391	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.841.772.500	2.841.772.500	
1.03.10.2.01.14	Pembangunan Underpass	1.000.000.000	2.014.798.578	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.616.997.000	612.100.700	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000	192.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	192.000.000	192.000.000	
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	50.000.000	
1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan	22.000.000	22.000.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000	60.000.000	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000	60.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.564.520.000	1.518.738.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	801.400.000	866.718.400	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000	96.400.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	391.400.000	391.400.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	60.000.000	78.918.400	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	26.400.000	26.400.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	13.200.000	13.200.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	13.200.000	13.200.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	265.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	265.000.000	265.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	471.720.000	360.619.600	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	245.000.000	133.899.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50.000.000	50.000.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	176.720.000	176.720.000	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.251.353.101	26.565.219.696	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.787.657.061	20.240.051.561	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.527.741.481	7.541.579.972	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.167.903.183	7.128.743.471	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	555.058.896	555.058.896	
1.03.02.2.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	49.392.342	49.392.342	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.370.540.960	6.342.112.548	
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	192.910.985	182.179.685	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	359.838.298	412.836.501	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	105.109.995	158.108.198	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	60.731.203	60.731.203	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	193.997.100	193.997.100	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.246.855.000	4.246.855.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.246.855.000	4.246.855.000	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.809.185.000	2.809.185.000	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	137.670.000	137.670.000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.300.000.000	1.300.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.376.584.000	6.441.689.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.376.584.000	6.441.689.500	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.676.438.300	1.662.100.300	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	799.621.000	800.000.000	
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	95.450.600	194.519.600	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12.780.000	12.780.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.766.254.100	1.766.249.600	
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	206.000.000	226.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.820.040.000	1.780.040.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.636.476.580	2.009.927.089	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.636.476.580	2.009.927.089	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	124.347.317	162.083.422	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	107.508.363	143.222.767	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000	500.000.000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	96.800.600	96.800.600	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	829.922.600	829.922.600	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	64.311.700	64.311.700	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	213.586.000	213.586.000	
1.04.1.03.0.00.01.0001	BLUD Air Minum	4.515.990.640	5.377.462.735	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.515.990.640	5.377.462.735	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.515.990.640	5.377.462.735	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	4.515.990.640	5.377.462.735	
1.04.1.03.0.00.01.0002	UPTD Pemakaman	947.705.400	947.705.400	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	947.705.400	947.705.400	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	947.705.400	947.705.400	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	947.705.400	947.705.400	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32.498.267.067	34.723.582.067	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.498.267.067	34.723.582.067	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.498.267.067	34.723.582.067	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.718.187.927	12.719.544.727	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.667.800	149.667.800	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.290.800	64.290.800	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.377.000	85.377.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.411.243.727	9.411.243.727	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.403.455.627	9.403.455.627	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.788.100	7.788.100	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.980.000	98.980.000	
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	98.980.000	98.980.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.800.000	145.300.000	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.800.000	145.300.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.800.400	620.588.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.000	1.956.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.749.200	211.588.200	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.110.300	71.835.300	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.984.900	66.260.700	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	244.948.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.300.000	417.300.000	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	417.300.000	417.300.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.866.000	803.935.000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.660.000	117.660.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	727.465.000	643.534.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.741.000	42.741.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.530.000	1.072.530.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.072.530.000	1.072.530.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.380.792.240	4.631.124.740	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	749.058.640	999.391.140	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	695.331.100	928.712.600	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.727.540	70.678.540	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.631.733.600	3.631.733.600	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3.631.733.600	3.631.733.600	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.669.123.750	5.849.953.750	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	207.279.500	207.279.500	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	91.911.500	91.911.500	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	115.368.000	115.368.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.461.844.250	5.642.674.250	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	489.476.000	489.476.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.208.769.350	4.389.599.350	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	763.598.900	763.598.900	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.881.971.750	1.881.971.750	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.881.971.750	1.881.971.750	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.881.971.750	1.881.971.750	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.848.191.400	9.640.987.100	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.848.191.400	9.640.987.100	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	222.196.700	222.196.700	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.718.396.450	3.016.192.150	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.907.598.250	6.402.598.250	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.009.965.849	33.314.164.416	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.029.210.058	26.333.408.625	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.029.210.058	26.333.408.625	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.529.641.958	18.585.205.525	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.349.400	427.929.400	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.566.000	20.536.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	17.610.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	389.783.400	389.783.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.987.012.758	15.987.012.825	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.931.372.758	15.931.372.825	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	45.640.000	45.640.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.010.000	87.810.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.010.000	87.810.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.077.800	530.459.300	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.317.000	229.485.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.200.000	44.200.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.565.800	70.114.300	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.995.000	174.660.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.000.000	162.002.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	15.002.000	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.000.000	147.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.090.000	340.890.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.640.000	38.640.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.200.000	56.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.250.000	246.250.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.102.000	1.049.102.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.092.102.000	997.102.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.000.000	52.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.541.475.000	5.790.110.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.799.213.000	4.299.270.100	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.290.333.000	1.234.773.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	39.750.000	26.500.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.780.000	1.525.027.100	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	310.150.000	1.415.770.000	
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	97.200.000	97.200.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	733.260.000	1.481.837.900	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.980.000	522.977.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18.000.000	18.000.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	592.280.000	940.860.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	9.002.000	9.002.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	9.002.000	9.002.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.958.093.100	1.958.093.100	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.584.624.000	1.584.624.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.204.200.000	1.204.200.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	351.893.000	351.893.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	28.531.000	28.531.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	350.545.200	350.545.200	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	328.945.200	328.945.200	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21.600.000	21.600.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.923.900	22.923.900	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	22.923.900	22.923.900	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.980.755.791	6.980.755.791	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.980.755.791	6.980.755.791	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.445.576.991	4.426.404.091	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.748.000	53.748.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.323.000	39.323.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.425.000	14.425.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.385.091	2.757.385.291	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.717.210.091	2.717.210.291	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	40.175.000	40.175.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.300.000	44.300.000	
1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.300.000	44.300.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.266.000	110.266.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.266.000	110.266.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.236.500	417.695.400	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.336.300	78.836.300	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.966.400	108.966.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.037.800	55.037.700	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.896.000	174.855.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.177.400	366.045.400	
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	391.177.400	366.045.400	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.842.000	373.342.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.500.000	45.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.342.000	328.342.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.622.000	303.622.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.870.000	207.870.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.752.000	95.752.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.535.178.800	2.554.351.700	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	904.035.200	923.208.100	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	399.500.000	399.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	504.535.200	523.708.100	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	810.866.600	810.233.400	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	123.706.000	123.706.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	111.600.000	117.336.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	128.922.800	134.553.600	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	76.806.800	76.806.800	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	182.395.000	182.395.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102.400.000	102.400.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	85.036.000	73.036.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	820.277.000	820.910.200	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	820.277.000	820.910.200	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.771.447.272	14.834.447.272	
1.06.2.14.2.08.06.0000	Dinas Sosial	13.771.447.272	14.834.447.272	
1.06.2.14.2.08.06.0000	Dinas Sosial	13.771.447.272	14.834.447.272	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.110.478.472	6.229.085.592	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.463.000	103.663.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.023.000	50.223.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.440.000	53.440.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.133.045.772	5.123.805.892	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.084.335.772	5.084.335.892	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.710.000	39.470.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.470.000	69.925.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.470.000	69.925.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.496.700	590.688.700	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.565.000	8.565.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.855.100	402.947.100	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.414.600	30.663.500	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.593.000	27.613.100	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.069.000	111.900.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	120.000.000	
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	120.000.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.223.000	131.223.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.100.000	60.100.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.800.000	14.800.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.323.000	56.323.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.780.000	89.780.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.780.000	89.780.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.751.288.600	1.851.130.880	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.751.288.600	1.851.130.880	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	814.523.000	738.163.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.120.000	143.370.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	552.266.600	798.468.880	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	219.379.000	171.129.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.421.962.400	1.421.962.400	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.363.550.400	1.363.550.400	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	51.800.000	51.800.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	125.970.000	125.970.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	253.527.000	253.527.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.000.000	12.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	522.318.000	522.318.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	124.500.000	124.500.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.400.000	5.400.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.400.000	5.400.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.511.400	14.511.400	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	184.974.000	184.974.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.350.000	7.350.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	55.800.000	55.800.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	58.412.000	58.412.000	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33.412.000	33.412.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	25.000.000	25.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.708.744.800	4.550.114.440	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	107.786.700	104.216.520	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	73.698.100	82.027.920	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.237.800	9.337.800	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	18.850.800	12.850.800	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.600.958.100	4.445.897.920	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	401.666.500	306.226.500	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	447.380.000	343.430.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.751.911.600	3.796.241.420	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	778.973.000	782.153.960	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	231.788.000	231.788.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	139.988.000	139.988.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	61.200.000	61.200.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	30.600.000	30.600.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	547.185.000	550.365.960	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	37.605.000	37.605.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	509.580.000	512.760.960	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.319.648.353	10.936.044.853	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.319.648.353	10.936.044.853	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.319.648.353	10.936.044.853	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.287.834.153	6.330.471.575	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.682.200	126.173.300	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.853.800	22.853.800	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.043.700	6.043.700	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.462.000	7.568.100	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.394.900	4.474.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.404.000	3.404.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.523.800	81.828.800	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.099.449.753	5.102.869.753	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.044.622.253	5.044.622.253	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.628.400	5.628.400	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	49.199.100	52.619.100	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.210.000	23.210.000	
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.210.000	23.210.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.199.700	70.199.700	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.199.700	70.199.700	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.862.822	299.836.822	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.062.800	30.062.800	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.603.200	38.597.200	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.646.822	17.646.822	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.550.000	183.530.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.905.000	282.905.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.905.000	282.905.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.188.000	110.028.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	18.600.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.588.000	91.428.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.336.678	315.249.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.799.000	223.104.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.537.678	92.145.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	54.004.000	100.006.678	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	54.004.000	100.006.678	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	54.004.000	100.006.678	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.184.141.600	2.687.298.100	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.118.489.800	2.621.646.300	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.118.489.800	2.621.646.300	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	65.651.800	65.651.800	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	65.651.800	65.651.800	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	596.406.400	607.011.300	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	252.159.300	290.644.300	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	171.099.200	209.584.200	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	43.983.400	43.983.400	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	37.076.700	37.076.700	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	318.754.400	290.874.300	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	137.877.000	137.877.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	180.877.400	152.997.300	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.492.700	25.492.700	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.492.700	25.492.700	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.197.262.200	1.211.257.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	433.023.000	436.558.000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	46.499.000	46.499.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	46.499.000	46.499.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	340.025.000	343.560.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	764.239.200	774.699.200	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	317.180.100	320.570.100	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86.195.100	89.730.100	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	198.572.000	198.572.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	162.292.000	165.827.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.133.760.842	9.251.897.342	
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.133.760.842	9.251.897.342	
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.133.760.842	9.251.897.342	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.968.283.642	8.012.251.342	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.490.000	136.655.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.990.000	49.190.000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.500.000	87.465.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.987.698.642	6.984.697.342	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.938.638.642	6.938.637.342	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.060.000	46.060.000	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.220.000	12.750.000	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.220.000	12.750.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.822.000	422.110.000	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.565.000	8.565.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.194.400	85.512.400	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.364.400	74.364.400	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.591.200	44.391.200	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	5.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.107.000	204.277.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	95.000.000	
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	95.000.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.843.000	126.479.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.028.000	12.414.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.950.000	45.200.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.865.000	68.865.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.210.000	234.560.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.210.000	234.560.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	763.088.500	837.632.300	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	91.921.000	91.921.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	91.921.000	91.921.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	651.693.500	726.237.300	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	651.693.500	726.237.300	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.474.000	19.474.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.474.000	19.474.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	126.090.000	131.170.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	126.090.000	131.170.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.090.000	131.170.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.405.000	60.405.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.405.000	60.405.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	60.405.000	60.405.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	215.893.700	210.438.700	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	215.893.700	210.438.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.459.400	67.062.400	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.434.300	143.376.300	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.296.821.253	10.298.075.353	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	10.296.821.253	10.298.075.353	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	10.296.821.253	10.298.075.353	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.543.978.653	9.545.232.653	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.638.300	50.892.100	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.689.800	18.205.800	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.475.900	3.475.900	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.217.100	4.217.100	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.736.500	18.318.500	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.519.000	6.674.800	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.676.765.953	8.676.766.353	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.674.051.953	8.674.052.353	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2.714.000	2.714.000	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.800.000	15.300.000	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.800.000	15.300.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.054.400	169.045.200	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.677.000	4.987.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.289.300	29.775.300	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.159.600	29.796.800	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.017.500	15.105.100	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.911.000	89.381.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.060.000	411.289.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.990.000	67.634.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.070.000	342.655.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.660.000	181.940.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.910.000	172.190.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.750.000	9.750.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	684.970.700	684.970.600	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70.622.800	74.516.800	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	45.174.000	45.174.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15.448.800	12.098.800	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	10.000.000	17.244.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	228.827.900	224.934.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	228.827.900	224.934.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	385.520.000	385.519.800	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	3.250.000	3.250.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	382.270.000	382.269.800	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	39.832.400	39.832.600	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.832.400	39.832.600	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5.492.400	5.492.400	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.340.000	34.340.200	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28.039.500	28.039.500	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	28.039.500	28.039.500	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.039.500	28.039.500	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.406.395.950	54.506.395.950	
2.11.0.00.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup	54.406.395.950	54.506.395.950	
2.11.0.00.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup	40.074.023.950	40.174.023.950	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.058.547.590	20.158.547.590	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.894.000	58.350.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.644.000	47.100.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.250.000	11.250.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.647.732.835	12.747.732.835	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.637.876.035	12.737.876.035	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.503.600	6.503.600	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.353.200	3.353.200	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	552.538.000	546.742.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	552.538.000	546.742.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.365.000	432.865.200	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.961.000	1.961.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.262.300	65.112.300	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.204.800	97.204.800	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.010.900	49.541.100	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	8.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.926.000	211.046.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	55.000.000	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	55.000.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.243.760	272.083.560	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.840.000	76.680.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.060.760	147.060.560	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.343.000	48.343.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.045.773.995	6.045.773.995	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.773.995	6.045.773.995	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	247.680.110	247.680.110	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	247.680.110	247.680.110	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	247.680.110	247.680.110	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	816.295.650	816.295.650	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	719.544.550	719.544.550	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,	611.388.750	611.388.750	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Air, Udara, dan Laut			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.155.800	108.155.800	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	96.751.100	96.751.100	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	96.751.100	96.751.100	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.520.284.900	1.520.284.900	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.520.284.900	1.520.284.900	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	98.957.000	98.957.000	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	229.146.000	229.146.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.012.511.900	1.012.511.900	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	179.670.000	179.670.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	4.354.400	4.354.400	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	4.354.400	4.354.400	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.354.400	4.354.400	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	948.300.700	948.300.700	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	948.300.700	948.300.700	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	230.634.500	230.634.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	717.666.200	717.666.200	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.050.300	113.050.300	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.050.300	113.050.300	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.050.300	113.050.300	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	172.240.400	172.240.400	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	172.240.400	172.240.400	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	58.932.600	58.932.600	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	113.307.800	113.307.800	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.193.269.900	16.193.269.900	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	16.193.269.900	16.193.269.900	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3.530.994.300	3.530.994.300	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.607.525.400	1.607.525.400	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5.712.204.000	5.712.204.000	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5.277.546.200	5.277.546.200	
2.11.0.00.0.00.02.0001	UPTD Laboratorium Lingkungan	1.719.488.000	1.719.488.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.719.488.000	1.719.488.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.719.488.000	1.719.488.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.719.488.000	1.719.488.000	
2.11.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pelayanan Persampahan	12.612.884.000	12.612.884.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.612.884.000	12.612.884.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	12.612.884.000	12.612.884.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.612.884.000	12.612.884.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.677.295.758	10.930.518.558	
2.12.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.677.295.758	10.930.518.558	
2.12.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.677.295.758	10.930.518.558	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.178.987.758	9.426.425.558	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.648.800	35.628.800	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.276.800	22.256.800	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.372.000	13.372.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.369.409.358	7.369.409.458	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.365.910.358	7.365.910.458	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.499.000	1.499.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.150.000	167.267.800	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.150.000	167.267.800	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.348.687.600	1.417.752.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.022.074.600	968.687.400	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.987.000	11.709.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.426.000	71.176.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.136.000	107.598.100	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	8.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.064.000	250.582.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	77.675.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	77.675.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.457.000	142.732.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.900.000	18.900.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.557.000	123.832.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.960.000	215.960.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.960.000	215.960.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	486.749.000	486.749.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	321.749.000	321.749.000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	21.799.000	21.799.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	290.800.000	290.800.000	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	9.150.000	9.150.000	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	165.000.000	165.000.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	165.000.000	165.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	356.785.000	356.785.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	356.785.000	356.785.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	356.785.000	356.785.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	637.974.200	643.759.200	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	101.310.900	99.440.900	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	91.420.000	89.550.000	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.890.900	9.890.900	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	536.663.300	544.318.300	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	216.630.100	230.035.100	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.803.400	86.053.400	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	234.229.800	228.229.800	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.799.800	16.799.800	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	16.799.800	16.799.800	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16.799.800	16.799.800	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	774.500.200	901.181.200	
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	774.500.200	901.181.200	
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	774.500.200	901.181.200	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	62.040.900	45.790.900	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62.040.900	45.790.900	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.842.000	19.842.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	42.198.900	25.948.900	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	712.459.300	855.390.300	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	712.459.300	855.390.300	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	117.085.000	171.805.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85.971.300	72.846.300	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	187.960.000	185.288.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.377.000	75.377.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	95.000.000	115.000.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	137.066.000	235.074.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.372.337.200	7.327.519.700	
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.372.337.200	7.327.519.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.2.14.2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.372.337.200	7.327.519.700	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	491.962.000	489.469.400	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	54.224.000	96.076.500	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	27.082.000	69.684.500	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	27.142.000	26.392.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	437.738.000	393.392.900	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	437.738.000	319.953.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	73.439.900	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.560.401.800	3.417.558.900	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	510.210.000	809.525.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	76.375.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	95.640.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	510.210.000	510.210.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	46.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0	40.500.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0	40.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	885.538.800	916.928.800	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	885.538.800	916.928.800	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.164.653.000	1.484.105.100	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	13.950.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	708.455.100	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	190.059.400	190.059.400	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	3.000.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4.974.593.600	568.640.600	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	207.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	207.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	319.973.400	3.420.491.400	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	139.618.800	3.240.411.800	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	363.453.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	2.737.340.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.830.000	78.830.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	60.788.800	60.788.800	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	180.354.600	180.079.600	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	180.354.600	180.079.600	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.295.570.276	33.605.808.444	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	32.295.570.276	33.605.808.444	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	30.809.729.906	32.032.220.989	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.285.816.806	21.025.390.889	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.275.900	172.362.600	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.555.500	119.813.500	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.720.400	52.549.100	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.379.363.130	10.387.033.297	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.333.231.330	10.333.231.497	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.775.300	15.775.300	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	30.356.500	38.026.500	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.029.200	238.529.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185.029.200	238.529.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	656.631.000	656.631.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.632.000	10.632.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.001.300	60.001.300	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.550.200	95.550.200	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.451.500	285.451.500	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.996.000	174.996.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.567.000	322.301.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.992.000	204.992.000	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.575.000	117.309.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.693.668.576	8.394.251.992	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.470.208.576	8.170.791.992	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000	223.460.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.282.000	854.282.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	815.282.000	815.282.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	39.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.523.913.100	11.006.830.100	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.952.431.100	8.415.044.100	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.138.300.300	3.138.300.300	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	702.524.000	1.161.565.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.223.981.900	3.227.553.900	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	887.624.900	887.624.900	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	606.381.150	624.371.950	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	537.045.550	552.545.550	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	69.335.600	71.826.400	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	299.270.000	299.270.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	299.270.000	299.270.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	957.144.100	1.073.702.100	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	568.977.900	549.427.900	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	364.487.000	491.545.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.679.200	32.729.200	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	22.447.400	32.947.400	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	22.447.400	32.947.400	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	296.129.350	296.129.350	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	23.165.350	23.165.350	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	252.387.400	252.387.400	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.576.600	20.576.600	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam	292.094.100	167.349.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.973.800	2.492.200	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	140.120.300	164.857.100	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.015.900	98.015.900	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.015.900	98.015.900	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1.485.840.370	1.573.587.455	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.485.840.370	1.573.587.455	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.473.917.870	1.561.664.955	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.000.000	6.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	26.450.000	26.450.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	107.665.085	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.116.000	19.116.000	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000	5.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.280.951.870	1.371.033.870	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.400.000	26.400.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.922.500	11.922.500	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11.922.500	11.922.500	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.842.116.760	11.842.116.760	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.842.116.760	11.842.116.760	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.842.116.760	11.842.116.760	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.805.158.160	6.833.656.260	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.925.500	41.448.500	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.128.000	13.378.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.797.500	28.070.500	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.251.560.660	6.222.069.760	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.208.865.660	6.208.866.760	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.695.000	13.203.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.400.000	14.200.000	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.400.000	14.200.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000	5.700.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.600.000	5.700.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.116.000	331.829.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.111.600	69.194.600	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.596.400	32.493.400	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.459.000	17.072.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000	213.069.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.079.000	87.566.000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.090.000	39.010.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.800.000	700.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.189.000	47.856.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.477.000	130.843.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.510.000	46.255.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.810.000	55.000.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.157.000	29.588.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.107.129.800	2.107.129.700	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.107.129.800	2.107.129.700	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	241.904.800	241.904.800	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	121.960.000	136.960.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.743.265.000	1.728.264.900	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.929.828.800	2.901.330.800	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.814.983.300	1.803.583.300	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.814.983.300	1.803.583.300	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.114.845.500	1.097.747.500	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	181.200.000	233.500.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	594.205.500	539.807.500	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	208.390.000	213.390.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	131.050.000	111.050.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.973.743.000	13.033.743.000	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	12.973.743.000	13.033.743.000	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	12.973.743.000	13.033.743.000	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.252.287.500	10.397.465.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.539.800	118.539.800	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.880.000	8.880.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.659.800	109.659.800	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.101.127.200	9.101.132.700	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.045.987.200	9.045.992.700	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.880.000	8.880.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	46.260.000	46.260.000	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.905.000	45.715.000	
2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.905.000	45.715.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.200.000	79.200.000	
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.200.000	79.200.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.565.500	608.927.500	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.735.000	28.735.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.848.500	69.847.500	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.582.000	3.582.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.460.000	112.460.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.200.000	168.680.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.740.000	225.623.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.320.000	98.320.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.320.000	86.320.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.630.000	345.630.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.630.000	248.630.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.000.000	97.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	89.000.000	79.700.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	89.000.000	79.700.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.000.000	29.700.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	452.083.000	447.198.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	452.083.000	447.198.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.800.000	4.800.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	447.283.000	442.398.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	489.200.000	285.000.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	489.200.000	285.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	489.200.000	285.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	106.000.000	106.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000	106.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	106.000.000	106.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	482.257.600	452.177.600	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	482.257.600	452.177.600	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	419.687.200	389.607.200	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.570.400	62.570.400	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.102.914.900	1.266.202.400	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.102.914.900	1.266.202.400	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.102.914.900	1.266.202.400	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	29.748.518.561	30.097.649.874	
2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.748.518.561	30.097.649.874	
2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.748.518.561	30.097.649.874	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.664.782.361	27.078.139.874	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.990.400	195.990.200	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.355.200	60.355.200	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.635.200	135.635.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.370.209.713	6.775.638.105	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.346.276.413	6.751.704.805	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.524.600	11.524.600	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12.408.700	12.408.700	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.400.000	50.400.000	
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.400.000	50.400.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.599.998	141.599.998	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136.599.998	141.599.998	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.328.522.750	1.293.011.050	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	583.586.800	602.140.800	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.294.000	35.294.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.467.000	76.026.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.324.950	196.075.250	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.850.000	208.475.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	175.000.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.366.750.998	12.787.882.311	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.366.750.998	12.787.882.311	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.488.155.002	5.105.404.710	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	7.000.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.733.358.202	2.733.367.910	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.738.796.800	2.365.036.800	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.153.500	728.213.500	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289.422.000	289.422.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.731.500	438.791.500	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	376.969.900	376.969.900	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	230.047.000	230.047.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	137.211.200	137.211.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	92.835.800	92.835.800	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	146.922.900	146.922.900	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	146.922.900	146.922.900	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	337.913.100	458.811.500	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	337.913.100	458.811.500	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	337.913.100	458.811.500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.228.257.200	1.228.082.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.228.257.200	1.228.082.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	723.230.500	723.208.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	123.250.700	123.250.700	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	175.026.000	174.873.300	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	206.750.000	206.750.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	487.954.700	488.129.700	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	487.954.700	488.129.700	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	402.873.000	36.829.800	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	44.347.600	408.605.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.734.100	42.694.500	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	652.641.300	467.516.900	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	652.641.300	467.516.900	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	652.641.300	467.516.900	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	29.703.931.934	40.067.951.434	
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	29.703.931.934	40.067.951.434	
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	29.703.931.934	40.067.951.434	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.764.586.834	6.120.942.634	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.335.600	220.467.600	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.034.300	196.166.300	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.301.300	24.301.300	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.809.118.355	4.805.643.455	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.699.455	4.681.699.555	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.330.900	84.880.900	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.848.000	1.848.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	39.240.000	37.215.000	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.200.000	96.200.000	
2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.200.000	96.200.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.736.300	436.025.000	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.040.000	4.040.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.600.300	80.600.300	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.688.000	13.688.000	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.571.400	25.571.400	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.208.600	77.382.300	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000	12.500.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.128.000	222.243.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.620.600	34.620.600	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.199.600	24.199.600	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.421.000	10.421.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.575.979	527.985.979	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.390.000	71.390.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.384.079	202.244.079	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.801.900	215.351.900	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	39.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.023.370.000	1.117.049.400	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.304.000	630.303.900	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	89.304.000	89.304.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	61.000.000	61.000.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400.000.000	479.999.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	473.066.000	486.745.500	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	473.066.000	486.745.500	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	22.615.975.100	32.529.959.400	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.490.000.000	13.532.945.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.490.000.000	13.532.945.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.515.065.000	18.371.746.600	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	14.515.065.000	18.371.746.600	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	610.910.100	625.267.800	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	410.910.100	425.267.800	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200.000.000	200.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	300.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000	300.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	263.938.600	263.938.600	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.938.600	263.938.600	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.938.600	263.938.600	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	263.938.600	263.938.600	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	263.938.600	263.938.600	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	236.750.000	236.750.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	27.188.600	27.188.600	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	368.964.000	368.964.000	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	368.964.000	368.964.000	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	368.964.000	368.964.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	368.964.000	368.964.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.964.000	298.964.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.500.000	62.500.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236.464.000	236.464.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	941.673.600	1.326.673.600	
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	941.673.600	1.326.673.600	
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	941.673.600	1.326.673.600	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	941.673.600	1.326.673.600	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	311.443.600	511.443.600	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	164.675.600	314.675.600	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	146.768.000	196.768.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	630.230.000	815.230.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	630.230.000	815.230.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	605.563.200	605.563.200	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip Daerah	605.563.200	605.563.200	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip Daerah	605.563.200	605.563.200	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	605.563.200	605.563.200	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	398.724.900	398.724.900	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	337.924.900	337.924.900	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.000.000	30.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.800.000	30.800.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206.838.300	206.838.300	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	80.838.300	80.838.300	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	126.000.000	126.000.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.766.669.827	6.766.669.827	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip Daerah	6.766.669.827	6.766.669.827	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip Daerah	6.766.669.827	6.766.669.827	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.221.914.327	6.221.914.327	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.815.500	98.015.500	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.013.000	6.678.000	
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.802.500	91.337.500	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.241.004.027	5.241.004.027	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.198.309.027	5.198.309.027	
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.695.000	42.695.000	
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.492.000	19.492.000	
2.24.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.492.000	19.492.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000	4.400.000	
2.24.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.600.000	4.400.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.754.300	432.400.800	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.490.000	246.121.000	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.086.000	22.132.000	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.012.300	12.019.800	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.166.000	152.128.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.255.000	99.255.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	53.400.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.855.000	45.855.000	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.993.500	327.347.000	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.850.000	53.850.000	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.412.000	246.512.000	
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.731.500	26.985.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	352.663.500	352.663.500	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	48.471.500	48.471.500	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	48.471.500	48.471.500	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	141.172.200	141.172.200	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	141.172.200	141.172.200	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	163.019.800	163.019.800	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	163.019.800	163.019.800	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	177.400.000	177.400.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	177.400.000	177.400.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	177.400.000	177.400.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14.692.000	14.692.000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	14.692.000	14.692.000	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	14.692.000	14.692.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	689.888.700	689.888.700	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	689.888.700	689.888.700	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	689.888.700	689.888.700	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	595.364.100	595.364.100	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	49.658.200	49.658.200	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49.658.200	49.658.200	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	545.705.900	545.705.900	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	545.705.900	545.705.900	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	94.524.600	94.524.600	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	94.524.600	94.524.600	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	94.524.600	94.524.600	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.282.470.000	3.340.950.050	
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.282.470.000	3.340.950.050	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.3.26.2.19.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.282.470.000	3.340.950.050	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	354.606.200	2.474.639.250	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	259.730.000	2.379.763.050	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	259.730.000	2.379.763.050	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	94.876.200	94.876.200	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	89.286.200	89.286.200	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	5.590.000	5.590.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	254.046.800	192.493.800	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	254.046.800	192.493.800	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	56.520.000	56.520.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	96.671.800	59.353.800	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	70.300.000	70.300.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30.555.000	6.320.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	673.817.000	673.817.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	673.817.000	673.817.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	330.899.000	330.899.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	253.164.000	253.164.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	89.754.000	89.754.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.061.767.100	1.409.780.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	1.061.767.100	1.409.780.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	1.061.767.100	1.409.780.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	33.310.100	33.310.100	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	33.310.100	33.310.100	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	33.310.100	33.310.100	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	689.928.600	1.059.195.600	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.220.000	124.220.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	104.220.000	124.220.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	30.650.500	379.917.500	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30.650.500	379.917.500	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	555.058.100	555.058.100	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	555.058.100	555.058.100	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	338.528.400	317.274.300	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	338.528.400	317.274.300	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	70.887.600	63.383.500	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	267.640.800	253.890.800	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.946.670.400	6.308.321.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	5.946.670.400	6.308.321.400	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	2.353.868.500	2.715.519.500	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	94.160.000	94.160.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	55.410.000	55.410.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55.410.000	55.410.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	38.750.000	38.750.000	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	38.750.000	38.750.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	665.286.000	1.063.559.200	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	447.000.000	845.273.200	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	447.000.000	845.273.200	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	218.286.000	218.286.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	128.912.000	128.912.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	89.374.000	89.374.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	407.526.000	180.322.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21.240.000	21.240.000	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.620.000	7.620.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	13.620.000	13.620.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	386.286.000	159.082.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.420.000	30.420.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	355.866.000	128.662.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	633.383.000	762.538.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	633.383.000	762.538.000	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	219.440.000	157.045.000	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	254.620.000	397.620.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	159.323.000	207.873.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	390.475.900	396.002.700	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	390.475.900	396.002.700	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	357.275.900	362.802.700	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	33.200.000	33.200.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	163.037.600	218.937.600	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	163.037.600	218.937.600	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	108.200.000	164.100.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	54.837.600	54.837.600	
3.30.2.17.3.31.07.0003	UPTD Pasar	3.592.801.900	3.592.801.900	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.592.801.900	3.592.801.900	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.592.801.900	3.592.801.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.592.801.900	3.592.801.900	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.179.765.000	5.358.114.000	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	5.179.765.000	5.358.114.000	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	907.025.000	1.085.374.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	667.757.000	846.106.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	667.757.000	846.106.000	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	34.416.000	37.710.000	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	111.429.200	108.729.200	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40.946.000	186.812.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	358.510.800	390.399.800	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	122.455.000	122.455.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	70.791.000	70.791.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	70.791.000	70.791.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	57.231.000	57.231.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.560.000	13.560.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	168.477.000	168.477.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	168.477.000	168.477.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	168.477.000	168.477.000	
3.30.2.17.3.31.07.0002	UPTD Cimahi Technopark	4.272.740.000	4.272.740.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.272.740.000	4.272.740.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.272.740.000	4.272.740.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.272.740.000	4.272.740.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	13.805.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	0	13.805.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	0	13.805.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	13.805.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	13.805.000	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	13.805.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	61.651.071.652	64.203.592.263	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	61.651.071.652	64.203.592.263	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	61.651.071.652	64.203.592.263	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.645.190.752	57.972.569.763	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.995.000	144.995.000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.995.000	144.995.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.040.940.200	30.040.940.311	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.807.020.400	29.807.020.511	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.076.300	13.076.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	220.843.500	220.843.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.637.573.500	7.531.004.500	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	169.131.000	154.209.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	764.888.400	787.732.400	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.856.000	31.856.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.127.892.000	1.164.403.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	340.146.100	340.146.100	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.901.500	48.901.500	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.910.850.000	4.229.830.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.908.500	773.926.500	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.358.280.000	1.008.195.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	61.463.000	41.378.000	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.296.817.000	966.817.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.541.653.700	6.288.849.700	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.855.200	1.371.269.200	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.155.533.500	1.389.333.500	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.286.222.000	2.386.204.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.142.043.000	1.142.043.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.967.583.100	5.984.950.100	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	464.113.600	464.113.600	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.222.920.000	1.310.980.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.676.587.000	3.590.972.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	603.962.500	618.884.500	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.525.860.152	1.525.860.152	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.312.867.752	1.312.867.752	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	212.992.400	212.992.400	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.810.801.000	1.655.281.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	409.393.000	409.393.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	775.054.000	509.004.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	626.354.000	736.884.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	501.196.600	576.186.500	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	206.849.500	206.849.500	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	144.647.400	169.647.400	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	149.699.700	199.689.600	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.116.307.500	3.216.307.500	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.389.967.500	2.389.967.500	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	65.780.000	98.780.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	660.560.000	727.560.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.171.178.200	4.471.178.100	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	633.210.800	808.850.800	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	177.441.000	177.441.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	285.769.800	485.769.800	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	170.000.000	145.640.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.817.745.300	2.817.745.300	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.498.352.600	2.498.352.600	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	173.518.700	173.518.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	145.874.000	145.874.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	602.574.600	702.574.500	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	96.259.500	116.653.400	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	346.314.100	413.480.100	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	160.001.000	172.441.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	117.647.500	142.007.500	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	97.153.500	121.513.500	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20.494.000	20.494.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.834.702.700	1.759.844.400	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	641.341.400	363.861.400	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	146.336.200	146.336.200	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	414.978.200	137.498.200	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	80.027.000	80.027.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	516.881.500	544.503.200	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	257.895.000	278.276.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	258.986.500	266.227.200	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	676.479.800	851.479.800	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	228.782.400	260.362.400	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	84.965.800	116.960.800	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	362.731.600	474.156.600	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	87.277.207.777	94.127.207.777	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	87.277.207.777	94.127.207.777	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	87.277.207.777	94.127.207.777	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.990.731.977	55.512.633.577	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.799.800	571.851.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.711.000	151.087.800	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.088.800	420.763.800	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.734.235.909	6.846.679.909	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.734.235.909	6.846.679.909	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	639.214.000	615.544.000	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	600.000.000	600.000.000	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.214.000	15.544.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.408.000	126.408.000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	115.408.000	126.408.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.486.400	1.168.067.200	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.020.000	40.020.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.892.800	61.883.700	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.465.000	22.801.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.310.000	126.387.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	245.578.600	468.711.500	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	372.220.000	448.264.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.016.000	783.804.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	57.920.000	254.820.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.096.000	528.984.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.012.630.480	2.635.219.480	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.212.821.480	1.779.941.480	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.100.000	390.100.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.709.000	465.178.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.763.341.400	1.414.602.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.550.000	308.550.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	30.000.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.424.791.400	1.076.052.400	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.242.413.488	38.980.413.488	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.706.013.488	38.444.013.488	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	441.400.000	441.400.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	95.000.000	95.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.111.186.500	2.370.043.500	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.111.186.500	2.370.043.500	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	35.286.475.800	38.614.574.200	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10.175.231.800	9.602.589.800	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	206.650.800	641.203.800	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.268.660.000	6.177.424.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	754.901.000	1.096.164.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.154.320.000	1.153.276.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	790.700.000	534.522.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.767.678.400	5.763.243.400	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	964.313.300	964.313.300	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.604.850.500	1.845.205.500	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	1.335.505.500	1.335.505.500	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	986.565.100	1.084.258.100	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	876.444.000	533.961.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.488.720.100	10.242.551.400	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	783.408.000	853.368.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	839.952.000	1.008.310.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.009.584.000	1.187.260.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	783.408.000	862.128.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.070.060.100	1.986.495.400	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.002.308.000	4.344.990.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.687.149.400	8.708.339.700	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.638.320.600	2.991.727.100	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.118.671.000	1.633.848.300	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	600.602.500	780.388.900	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	162.246.600	393.768.700	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.167.308.700	2.908.606.700	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.895.272.300	3.080.778.400	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.895.272.300	3.080.778.400	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	462.565.000	495.908.700	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	462.565.000	495.908.700	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	809.858.800	721.162.800	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	809.858.800	721.162.800	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	12.843.516.762	13.654.256.962	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.843.516.762	13.654.256.962	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.843.516.762	13.654.256.962	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.828.438.662	11.580.708.962	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.253.800	168.802.900	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.070.400	129.420.500	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.183.400	39.382.400	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.713.385.562	10.117.275.562	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.703.681.562	10.103.681.562	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.852.000	4.852.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4.852.000	8.742.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.600.000	158.729.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.600.000	158.729.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.345.200	724.384.400	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.046.200	241.908.400	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.561.000	82.311.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.954.000	61.771.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.784.000	18.180.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	320.214.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	70.000.000	
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.676.000	104.926.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000	16.200.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.476.000	88.726.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.178.100	236.591.100	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.510.000	132.510.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.668.100	104.081.100	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.403.500	1.058.873.600	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	544.170.100	548.169.200	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	213.386.000	218.056.400	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	330.784.100	330.112.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	229.613.400	267.988.400	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	210.463.400	252.838.400	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19.150.000	15.150.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	226.620.000	242.716.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	11.595.000	11.595.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	215.025.000	231.121.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.014.674.600	1.014.674.400	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	375.987.200	375.987.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.060.900	116.060.900	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.484.500	17.484.500	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.570.000	17.570.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	184.871.800	184.871.600	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000	25.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	15.000.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	296.184.000	296.184.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	122.728.000	122.728.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.910.000	3.910.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.210.000	4.210.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	158.506.000	158.506.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.130.000	3.130.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.700.000	3.700.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	342.503.400	342.503.400	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.508.400	96.508.400	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.775.000	12.775.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61.538.900	61.538.900	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.752.500	104.752.500	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.800.000	10.800.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	56.128.600	56.128.600	
5.02	KEUANGAN	58.988.015.282	63.024.584.363	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.639.060.952	13.139.060.952	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.639.060.952	13.139.060.952	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.294.470.352	9.984.562.352	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.683.000	125.683.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.394.200	69.394.200	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.288.800	56.288.800	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.317.083.252	8.817.083.252	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.270.822.152	8.770.822.152	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	46.261.100	46.261.100	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.490.000	63.484.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.490.000	63.484.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.991.700	427.974.700	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.396.000	2.396.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.596.200	157.596.200	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.869.000	7.869.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.263.000	81.263.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.831.500	61.831.500	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.500.000	3.500.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.536.000	113.519.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	77.675.000	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	77.675.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.377.400	119.377.400	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.677.400	88.677.400	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.700.000	30.700.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.170.000	353.285.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.940.000	264.055.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.230.000	89.230.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.344.590.600	3.154.498.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.344.590.600	3.154.498.600	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	58.429.400	58.429.400	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	57.370.200	207.370.200	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	94.637.200	144.637.200	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	408.013.600	658.013.600	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	249.019.500	341.517.500	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51.921.000	51.921.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	95.756.700	95.756.700	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	718.761.100	814.961.100	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	157.750.300	168.960.300	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	130.230.600	130.230.600	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	112.969.100	112.969.100	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	141.620.100	291.620.100	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	68.111.800	78.111.800	
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.348.954.330	49.885.523.411	
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.348.954.330	49.885.523.411	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.531.151.230	21.415.897.311	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.845.000	46.835.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.115.000	23.055.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.730.000	23.780.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.660.732.730	20.442.388.811	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.653.290.730	20.434.946.811	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.440.000	4.440.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.002.000	3.002.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.714.500	1.714.500	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.714.500	1.714.500	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.833.000	617.933.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.184.000	184.488.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.722.200	59.329.200	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.069.800	27.108.800	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000	184.050.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85.707.000	85.707.000	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.150.000	77.250.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	70.000.000	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.516.000	20.516.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	1.900.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.116.000	18.616.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.510.000	216.510.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.510.000	216.510.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27.805.665.800	27.371.988.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.122.184.300	1.137.184.300	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	73.399.000	73.399.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.213.000	66.213.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	159.360.200	159.360.200	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	211.862.400	211.862.400	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	21.711.700	16.733.700	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	21.711.700	21.711.700	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	127.828.600	126.078.600	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	126.892.200	133.620.200	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	190.149.500	180.339.500	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	15.786.400	15.786.400	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	107.269.600	132.079.600	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	232.345.200	237.935.200	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	42.613.200	42.613.200	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.727.800	16.727.800	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	21.331.000	26.921.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	22.478.900	22.478.900	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	19.673.300	19.673.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	76.447.600	76.447.600	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33.073.400	33.073.400	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	624.051.200	649.051.200	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	17.338.900	27.338.900	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	396.858.800	356.858.800	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	71.823.400	71.823.400	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18.221.000	18.221.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.654.000	74.654.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.905.100	30.905.100	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.634.000	36.634.000	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	14.373.600	19.373.600	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	13.242.400	13.242.400	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.500.000.000	25.020.733.000	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	500.000.000	500.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000	24.520.733.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	327.085.100	327.085.100	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	327.085.100	327.085.100	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.012.137.300	1.097.637.300	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.012.137.300	1.097.637.300	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	169.010.200	180.510.200	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.180.400	36.180.400	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.474.900	24.474.900	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	46.601.400	50.101.400	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	273.204.000	268.704.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	149.207.800	211.207.800	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	148.700.000	148.700.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.722.100	11.722.100	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.450.700	93.950.700	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.072.400	15.572.400	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56.513.400	56.513.400	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.328.645.050	11.000.310.850	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.328.645.050	11.000.310.850	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.328.645.050	11.000.310.850	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.149.828.750	8.170.224.550	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.000.000	43.000.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.502.142.450	7.502.142.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.490.142.450	7.490.142.450	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.000.300	439.122.100	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.999.700	127.121.500	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.500	42.000.500	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.100	75.000.100	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	175.000.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.000.000	42.000.000	
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	42.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.196.000	58.470.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.996.000	42.070.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.200.000	4.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.490.000	85.490.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.490.000	85.490.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.178.816.300	2.830.086.300	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.241.506.500	1.361.659.500	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	28.000.000	28.000.000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	914.000.000	1.044.005.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75.000.000	75.000.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	65.000.000	31.148.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	118.658.500	142.658.500	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	40.848.000	40.848.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	583.110.000	1.109.052.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	12.255.000	12.255.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	86.000.000	86.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	484.855.000	1.010.797.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	197.349.800	202.524.800	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	57.100.000	89.275.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	84.750.000	57.750.000	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	55.499.800	55.499.800	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	156.850.000	156.850.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.300.000	10.300.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	35.000.000	35.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	86.850.000	86.850.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10.200.000	10.200.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14.500.000	14.500.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.802.691.300	1.777.150.500	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.802.691.300	1.777.150.500	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.802.691.300	1.777.150.500	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.802.691.300	1.777.150.500	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	202.925.300	289.124.500	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	115.675.400	201.874.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	87.249.900	87.249.900	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.599.766.000	1.488.026.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	580.020.000	580.020.000	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.019.746.000	908.006.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	820.526.800	870.526.600	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	820.526.800	870.526.600	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	820.526.800	870.526.600	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	820.526.800	870.526.600	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	130.660.000	136.051.000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	130.660.000	136.051.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	193.960.600	188.569.400	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	71.950.700	69.359.500	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	29.288.700	29.288.700	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	92.721.200	89.921.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	495.906.200	545.906.200	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	121.315.500	152.215.500	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	362.302.500	381.402.500	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	12.288.200	12.288.200	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.154.990.436	11.075.290.436	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.154.990.436	11.075.290.436	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.154.990.436	11.075.290.436	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.322.350.436	9.978.824.436	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.020.000	21.620.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	11.600.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.020.000	10.020.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.108.104.736	8.608.104.736	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.095.504.736	8.595.504.736	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000	6.600.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	242.733.000	224.758.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	242.733.000	224.758.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.838.700	423.309.700	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.502.100	279.528.100	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.945.800	50.390.800	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.374.800	20.374.800	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.016.000	73.016.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.370.000	97.245.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	47.370.000	48.245.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	49.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.776.000	260.102.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	40.800.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.976.000	219.302.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.508.000	343.685.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.540.000	121.350.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.300.000	94.785.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.668.000	122.550.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	566.360.000	462.058.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	457.260.000	397.448.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	172.700.000	151.810.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29.350.000	22.590.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	41.350.000	27.450.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	43.550.000	17.400.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	170.310.000	178.198.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	109.100.000	64.610.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	46.150.000	40.960.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	62.950.000	23.650.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	266.280.000	634.408.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	38.000.000	163.654.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.000.000	163.654.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	228.280.000	470.754.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	171.800.000	365.127.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56.480.000	105.627.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	109.252.569.294	109.330.982.294	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Cimahi Utara	30.301.279.545	30.340.379.545	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Cimahi Utara	14.862.912.945	14.909.511.911	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.763.312.495	12.794.786.395	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.589.350	70.589.350	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.534.850	49.534.850	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.054.500	21.054.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.263.247.645	10.263.247.645	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.204.929.845	10.204.929.845	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.110.000	6.110.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	52.207.800	52.207.800	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.736.900	122.933.900	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.736.900	122.933.900	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	653.468.600	675.145.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.045.600	196.815.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.322.000	3.322.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.099.600	218.099.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.511.400	76.511.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.280.000	63.280.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.210.000	117.116.900	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.672.000	13.672.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13.672.000	13.672.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.318.000	598.318.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.947.000	157.947.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.371.000	440.371.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.280.000	1.050.880.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.680.000	443.680.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	585.600.000	607.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.253.169.800	1.250.469.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.143.124.100	1.140.424.100	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.143.124.100	1.140.424.100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	110.045.700	110.045.700	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	89.897.800	89.897.800	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.147.900	20.147.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	536.329.700	569.569.766	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	536.329.700	569.569.766	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.515.250	32.665.250	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	63.245.000	96.485.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	426.569.450	440.419.516	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	129.744.650	129.744.650	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	129.744.650	129.744.650	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	129.744.650	129.744.650	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	180.356.300	164.941.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.356.300	164.941.300	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.518.600	54.103.600	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110.837.700	110.837.700	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Cipageran	4.945.131.900	4.942.864.604	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.223.089.700	4.220.271.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.223.089.700	4.220.271.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.234.400	45.234.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.620.972.500	2.619.572.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.556.882.800	1.555.464.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	112.651.200	112.651.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	609.391.000	609.942.104	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	609.391.000	609.942.104	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.237.100	47.237.100	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	562.153.900	562.705.004	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Citeureup	3.501.939.900	3.499.524.956	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.931.609.900	2.928.765.932	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.931.609.900	2.928.765.932	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.921.000	45.921.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.732.178.000	1.730.778.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.153.510.900	1.152.066.932	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	112.651.200	112.651.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	457.678.800	458.107.824	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	457.678.800	458.107.824	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	31.641.000	31.641.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	426.037.800	426.466.824	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Cibabat	4.360.259.300	4.358.842.596	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.720.611.200	3.718.678.272	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.720.611.200	3.718.678.272	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	61.516.900	61.516.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.253.367.900	2.251.967.900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.405.726.400	1.405.193.472	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	112.651.200	112.651.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	526.996.900	527.513.124	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	526.996.900	527.513.124	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.403.700	45.403.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	481.593.200	482.109.424	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Pasirkaliki	2.631.035.500	2.629.635.478	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.188.419.800	2.186.740.738	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.188.419.800	2.186.740.738	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.438.100	40.438.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.286.479.800	1.285.079.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	861.501.900	861.222.838	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	112.651.200	112.651.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	112.651.200	112.651.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	329.964.500	330.243.540	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	329.964.500	330.243.540	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57.694.000	57.694.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	272.270.500	272.549.540	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Cimahi Tengah	41.566.298.605	41.584.539.605	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Cimahi Tengah	20.304.635.005	20.348.797.513	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.290.372.205	17.393.672.913	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.680.600	133.680.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.315.100	54.315.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.365.500	79.365.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.453.747.889	13.453.757.597	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.348.024.489	13.348.034.197	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.633.600	9.633.600	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	96.089.800	96.089.800	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.420.900	59.420.900	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.420.900	59.420.900	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	967.995.000	1.101.286.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.223.000	399.514.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	374.502.000	374.502.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.586.000	116.586.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.000.000	87.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.684.000	123.684.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	989.450.616	989.450.616	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	989.450.616	989.450.616	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.187.200	1.052.187.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.704.000	297.704.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.483.200	754.483.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.890.000	603.890.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.290.000	502.290.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	101.600.000	101.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.531.655.000	1.593.688.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.215.088.600	1.281.231.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.215.088.600	1.281.231.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	316.566.400	312.457.400	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	250.181.600	246.072.600	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	66.384.800	66.384.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	876.175.100	754.353.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	876.175.100	754.353.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91.043.800	91.043.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.240.600	113.298.600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	633.890.700	550.010.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.756.700	87.756.700	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.756.700	87.756.700	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.756.700	87.756.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	518.676.000	519.326.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	518.676.000	519.326.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	108.051.500	108.051.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	410.624.500	411.274.500	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Baros	4.279.880.200	4.280.874.280	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.677.504.700	3.687.016.320	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.677.504.700	3.687.016.320	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	92.172.500	97.158.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.374.083.500	2.373.973.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.211.248.700	1.215.884.320	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117.064.600	117.064.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.064.600	117.064.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.064.600	117.064.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.310.900	476.793.360	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.310.900	476.793.360	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	92.314.000	83.377.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	392.996.900	393.415.460	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Cigugur Tengah	3.663.918.300	3.663.918.016	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.029.007.600	3.048.690.148	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.029.007.600	3.048.690.148	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.394.900	62.151.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.721.277.600	1.721.277.600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.252.335.100	1.265.261.048	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116.641.600	116.641.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	518.269.100	498.586.268	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	518.269.100	498.586.268	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	98.065.400	98.065.400	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	420.203.700	400.520.868	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Karangmekar	3.333.127.200	3.333.127.076	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.840.681.500	2.840.681.436	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.840.681.500	2.840.681.436	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84.218.500	84.218.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.628.026.600	1.628.026.600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.128.436.400	1.128.436.336	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116.641.600	116.641.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	375.804.100	375.804.040	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	375.804.100	375.804.040	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.967.700	80.967.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	294.836.400	294.836.340	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Setiamanah	3.428.940.900	3.400.815.940	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.910.278.300	2.885.390.812	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.910.278.300	2.885.390.812	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73.221.000	73.221.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.680.459.800	1.680.459.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.156.597.500	1.131.710.012	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.641.600	116.641.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116.641.600	116.641.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	402.021.000	398.783.528	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	402.021.000	398.783.528	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	112.646.700	112.646.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	289.374.300	286.136.828	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Cimahi	2.359.394.500	2.359.394.044	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.944.693.000	1.944.692.744	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.944.693.000	1.944.692.744	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.939.300	67.939.300	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	985.772.100	985.772.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	890.981.600	890.981.344	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117.346.600	117.346.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.346.600	117.346.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.346.600	117.346.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	297.354.900	297.354.700	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	297.354.900	297.354.700	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.809.300	83.809.300	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	213.545.600	213.545.400	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Padasuka	4.196.402.500	4.197.612.736	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.558.180.800	3.558.874.812	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.558.180.800	3.558.874.812	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72.795.700	72.795.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.029.008.700	2.029.008.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.456.376.400	1.457.070.412	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117.346.600	117.346.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.346.600	117.346.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.346.600	117.346.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	520.875.100	521.391.324	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	520.875.100	521.391.324	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.594.200	80.594.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440.280.900	440.797.124	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Cimahi Selatan	37.384.991.144	37.406.063.144	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Cimahi Selatan	17.484.104.544	17.492.495.420	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.727.607.624	15.786.122.520	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.330.500	80.335.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.064.400	39.064.400	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.266.100	41.271.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.573.679.274	12.573.679.274	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.558.630.674	12.558.630.674	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.430.600	8.430.600	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.618.000	6.618.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.564.000	53.164.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.564.000	53.164.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.608.600	998.150.496	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.239.000	26.239.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.255.700	288.128.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354.075.600	369.230.796	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.650.300	54.192.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	75.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.388.000	185.360.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.615.000	128.935.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	109.615.000	128.935.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.185.000	773.435.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.997.000	233.247.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.188.000	540.188.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.180.625.250	1.178.423.250	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	470.204.250	470.204.250	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	710.421.000	708.219.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	910.650.100	910.650.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	821.460.700	821.460.700	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	821.460.700	821.460.700	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	89.189.400	89.189.400	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32.237.000	32.237.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	56.952.400	56.952.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	483.181.320	446.263.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	483.181.320	446.263.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72.992.000	70.592.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	55.226.100	55.226.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.963.220	320.445.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.442.300	142.442.300	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.442.300	142.442.300	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	142.442.300	142.442.300	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	220.223.200	207.017.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	220.223.200	207.017.200	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130.254.800	105.373.800	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	89.968.400	101.643.400	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Cibeber	2.715.845.200	2.715.913.712	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.281.083.300	2.280.792.548	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.281.083.300	2.280.792.548	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.305.000	48.305.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.267.787.800	1.267.787.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	964.990.500	964.699.748	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.400.000	114.400.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.400.000	114.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	320.361.900	320.721.164	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	320.361.900	320.721.164	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.808.000	36.808.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	283.553.900	283.913.164	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Leuwigajah	3.732.962.300	3.734.235.420	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.129.014.400	3.129.715.488	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.129.014.400	3.129.715.488	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.737.700	52.737.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.780.819.800	1.780.819.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.295.456.900	1.296.157.988	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.400.000	114.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	489.547.900	490.119.932	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	489.547.900	490.119.932	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	52.108.500	52.108.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	437.439.400	438.011.432	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Utama	2.954.336.100	2.955.516.644	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.440.530.000	2.441.288.496	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.440.530.000	2.441.288.496	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.800.900	57.800.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.426.023.500	1.426.023.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	956.705.600	957.464.096	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.400.000	114.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	399.406.100	399.828.148	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	399.406.100	399.828.148	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.460.300	53.460.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	345.945.800	346.367.848	
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Melong	5.706.779.500	5.715.459.536	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.988.833.400	4.996.791.420	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.988.833.400	4.996.791.420	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.023.900	81.011.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.191.757.500	3.191.757.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.716.052.000	1.724.022.020	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.400.000	114.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	603.546.100	604.268.116	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	603.546.100	604.268.116	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	46.361.400	46.361.400	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	557.184.700	557.906.716	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Cibeureum	4.790.963.500	4.792.442.412	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.129.412.900	4.130.239.556	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.129.412.900	4.130.239.556	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70.092.000	70.092.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.583.222.800	2.583.222.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.476.098.100	1.476.924.756	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.400.000	114.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.400.000	114.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	547.150.600	547.802.856	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	547.150.600	547.802.856	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	46.559.000	46.559.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500.591.600	501.243.856	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.356.357.208	10.809.307.208	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.356.357.208	10.809.307.208	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.356.357.208	10.809.307.208	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.383.210.958	5.481.066.958	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.238.500	6.438.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.850.000	3.050.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.388.500	3.388.500	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.928.324.508	4.928.324.508	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.845.244.508	4.845.244.508	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	83.080.000	83.080.000	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.573.000	81.573.000	
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81.573.000	81.573.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.696.750	322.352.750	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.109.900	117.865.900	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.329.000	37.329.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.734.850	14.944.850	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.523.000	152.213.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.003.200	65.003.200	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.220.000	16.220.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.783.200	42.783.200	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.375.000	47.375.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.375.000	47.375.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	446.953.100	446.953.100	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	446.953.100	446.953.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	446.953.100	446.953.100	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.105.530.450	2.194.386.450	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.105.530.450	2.194.386.450	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.105.530.450	2.194.386.450	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	494.106.100	484.506.100	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	494.106.100	484.506.100	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	494.106.100	484.506.100	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	261.962.600	261.962.600	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	261.962.600	261.962.600	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	261.962.600	261.962.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.664.594.000	1.940.432.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.664.594.000	1.940.432.000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	128.664.000	161.414.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.535.930.000	1.779.018.000	



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022**